

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. VISI** : Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa.
- 3. MISI** : 1. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik
5. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2018 (RIBU)
51	Pendidikan	1.000.000,00
52	Kesehatan	1.590.000,00
53	Perumahan dan Permukiman	4.500.000,00
54	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	20.727.000,00
55	Ketahanan Energi	200.000,00
56	Ketahanan Pangan	250.000,00
57	Penanggulangan Kemiskinan	53.103.000,00
59	Pembangunan wilayah	50.465.964,00
60	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan	80.046.394,00
Total		211.882.358,00

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara		131.333.816,00
01.01	Jumlah peristiwa konflik sosial	0	
01.02	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	0	
01.03	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	0	
02	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah		499.872.284,00
02.01	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	
02.02	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	0	
02.03	Jumlah Perda bermasalah	0	
02.04	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	0	
02.05	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	0	
02.06	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	0	
02.07	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	0	
02.08	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	0	
02.09	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	0	
02.10	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	0	
02.11	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	0	
03	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah		74.633.284,00
03.01	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	0	
03.02	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	0	
03.03	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	0	
03.04	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	0	
04	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa		219.687.596,00
04.01	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	0	
04.02	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	0	
04.03	Jumlah desa swasembada	0	
05	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya		884.783.485,00
05.01	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	0	
05.02	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	0	
05.03	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	0	
05.04	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	0	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
06	Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri		1.306.081.819,00
06.01	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	0	
06.02	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	0	
06.03	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	0	
06.04	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	0	
06.05	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	0	
06.06	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	0	
06.07	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	0	
06.08	Peningkatan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda melalui Pengembangan Kapasitas SDM	0	
Total			3.116.392.284,00

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2019	2020	2021
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
010.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	406.361.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.361.764,00	420.982.594,00	435.470.327,00	450.459.270,00
010.02.03	Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	74.293.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.293.717,00	76.780.485,00	79.350.761,00	82.002.663,00
010.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	48.283.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.283.120,00	49.373.027,00	49.078.601,00	51.203.984,00
010.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	179.860.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451.848,00	0,00	0,00	0,00	225.312.021,00	245.168.848,00	268.074.706,00	293.233.076,00
010.06.06	Program Bina Pembangunan Daerah	151.254.982,00	1.266.024,00	31.921.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.442.601,00	206.496.982,00	211.936.201,00	200.068.510,00
010.07.07	Program Bina Otonomi Daerah	110.268.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.268.301,00	144.885.201,00	164.802.201,00	183.980.201,00
010.04.08	Program Bina Administrasi Kewilayahan	156.878.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.878.262,00	214.939.153,00	223.465.924,00	232.851.023,00
010.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	74.633.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.633.284,00	84.810.353,00	90.803.524,00	96.886.692,00
010.08.10	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	884.783.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.783.485,00	914.992.001,00	946.232.028,00	978.538.387,00
010.03.11	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	131.333.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.333.816,00	334.592.055,00	335.433.504,00	340.460.894,00
010.01.12	Program Pendidikan Kepamongprajaan	587.057.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056.492,00	0,00	0,00	0,00	600.114.317,00	621.118.332,00	642.628.924,00	664.912.679,00
010.05.13	Program Bina Pemerintahan Desa	219.677.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	219.687.596,00	226.703.911,00	234.638.567,00	242.850.900,00
Total		3.024.685.732,00	1.266.024,00	31.921.595,00	0,00	0,00	0,00	58.518.933,00	0,00	0,00	0,00	3.116.392.284,00	3.540.842.942,00	3.681.915.268,00	3.817.448.279,00